

Judul : Usut dugaan aliran korupsi BTS ke Komisi I DPR
Tanggal : Rabu, 12 Juli 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 5

Usut Dugaan Aliran Korupsi BTS ke Komisi I DPR

Nistra Yohan merupakan staf ahli Sugiono selaku anggota Komisi I Bidang Pertahanan DPR. Ia akan diperiksa penyidik Kejaksaan Agung terkait dengan aliran dana kasus korupsi BTS 4G Bakti.

YAKUB P WIJAYAATMAJA
yakub@mediaindonesia.com

KEJAKSAAN Agung (Kejagung) terus mengusut dugaan uang korupsi BTS 4G Bakti mengalir ke Komisi I DPR RI. Hal itu berawal dari pengakuan terdakwa Irwan Hermawan (IH) perihal aliran uang sebesar Rp70 miliar melalui seseorang bernama Nistra Yohan.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM-Pidus) Kejagung Fehrie Adriansyah menyatakan telah meminta Nistra untuk hadir dalam pemeriksaan. Nistra merupakan staf ahli Sugiono selaku anggota Komisi I Bidang Pertahanan DPR.

Namun, hingga kini Nistra belum menunjukkan batang hidungnya di Gedung Bundar, Kejagung. "Sampai sekarang tidak ada, belum hadir (pemeriksaan). Yang jelas kita konfirmasi kebenarannya," tegas Febrie di Jakarta, kemarin.

Kejagung juga akan memeriksa sejumlah pihak yang diduga menerima aliran dana korupsi. Belasan nama itu terkuak berdasarkan keterangan terdakwa Irwan yang menjadi penghubung pihak-pihak tertentu dalam korupsi BTS 4G Kemenkominfo dan Bakti Kemenkominfo.

"Kemudian, kita juga akan tanya ke Irwan, kasihnya di mana, tempatnya di mana,

dan kapan waktunya. Itu nanti perlu didalami," lanjut Febrie.

Dalam berkas perkara untuk terdakwa Irwan terungkap nama Anang Latif, Feriandi dan Elvano dari Pokja, Latifah Hanum, dan Nistra Yohan. Selanjutnya, ialah Erry (Pertamina), Windu dan Setyo, Komisariss Utama PT Laman Tekno Digital Edward Hutahean.

Pihak lain yang diduga menerima aliran dana ialah Dito Ariotedjo ketika menjadi staf khusus Menko Perekonomian, Walbernis Wisang, dan terakhir Sadikin. Jumlah dana korupsi yang dialirkan Irwan ke pelbagai pihak sebanyak Rp243 miliar.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan penyidik JAM Pidus telah memeriksa 510 saksi untuk 8 berkas perkara.

"Dari 8 berkas perkara yang akan kita buat ini ada 510 saksi yang sudah kita periksa. Sampai saat ini ada yang dari Kemenkominfo, Bakti, dan swasta," kata Ketut.

Hormati hukum

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekali lagi menegaskan kepada semua pihak untuk menghormati proses hukum. Hal itu ia sampaikan saat ditanya soal pemanggilan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo oleh penyidik Kejagung, pada Senin (3/7).

"Tanyakan ke aparat penegak hukum. Jangan ditanyakan kepada saya. Wilayahnya ada di sana, maka selalu saya sampaikan kepada semuanya menghormati, kita harus menghormati semua proses hukum yang ada," tukas Jokowi seusai meresmikan ruas Tol Cisum dawu di Jawa Barat, kemarin.

Dito sudah dimintai keterangan pada pekan lalu dan ia langsung menyangkal keterlibatannya menerima uang sebesar Rp27 miliar yang disebut-sebut bersumber dari kasus korupsi yang merugikan negara Rp8,03 triliun itu.

Ketut Sumedana menambahkan, penyidik Kejagung bakal memanggil ulang Maqdir Ismail yang merupakan pengacara Irwan Hermawan, pada Kamis (13/7).

Maqdir akan diperiksa penyidik buntut pengakuannya menerima pengembalian aliran dana korupsi BTS Kemenkominfo sebesar Rp27 miliar. Ia juga dianggap sebagai orang yang pertama menyebut informasi perihal adanya bagi-bagi duit ke sejumlah politikus termasuk ke Dito.

"Kami klarifikasi lebih dulu, sumbernya dari mana, seperti apa alurnya, ini kan masih di masyarakat yang berpolemik. Tentu kita klarifikasi semua. Nanti kalau Maqdir datang dan sudah bawa uangnya. Tentu nanti kita semua lakukan pendalaman," terang Ketut. (Ind/A 3)